

# Kurikulum merdeka: Apa yang salah? Tinjauan literatur terhadap kelemahan dan tantangannya

Rohani\*, Muhammad Win Afgani, Afriantoni

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

\* rohanitalangpiase@gmail.com

## Abstract

*The “Merdeka Curriculum” is Indonesia’s latest educational policy initiative designed to address 21st-century learning demands. This curriculum emphasizes learning flexibility, differentiation, and character development through the Project to Strengthen the Pancasila Student Profile. However, its implementation in schools still faces significant challenges. This study aims to identify and analyze the weaknesses and obstacles of the Merdeka Curriculum by conducting a systematic literature review (SLR) of 20 verified scientific articles published between 2021 and 2024. The PRISMA method was employed to select and thematically analyze the literature. The review revealed five major challenges: (1) teachers’ lack of readiness to understand and apply the curriculum’s principles, (2) infrastructure inequality, especially in underdeveloped regions, (3) unclear policy direction and the absence of a proper transition period, (4) unresolved administrative burdens on teachers, and (5) difficulties in integrating the Pancasila Student Profile values into daily instruction. The study concludes that the Merdeka Curriculum is not yet fully prepared for national-scale implementation without comprehensive support in terms of teacher capacity, school facilities, and regulatory reform. This review provides reflective insights for shaping future education policy that is more contextual, equitable, and sustainable.*

**Keywords:** Educational Policy; Merdeka Curriculum; 21st-Century Learning

## Abstrak

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan kurikulum terbaru yang diusung pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Kurikulum ini menekankan fleksibilitas pembelajaran, diferensiasi, serta penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menuai berbagai persoalan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan serta tantangan pelaksanaan Kurikulum Merdeka berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 20 artikel ilmiah terverifikasi yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021–2024. Pendekatan yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan metode PRISMA untuk menyaring dan menganalisis data literatur secara tematik. Hasil kajian menemukan lima tema utama tantangan, yaitu: (1) ketidaksiapan guru dalam memahami dan menerapkan prinsip kurikulum, (2) ketimpangan infrastruktur, khususnya di daerah 3T, (3) ketidakjelasan arah kebijakan dan minimnya masa transisi, (4) beban administratif guru yang belum terselesaikan, dan (5) kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Kesimpulan kajian ini menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya siap diimplementasikan secara nasional tanpa dukungan menyeluruh terhadap kapasitas guru, fasilitas sekolah, serta perbaikan regulasi dan evaluasi. Kajian ini memberikan dasar reflektif bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan di masa mendatang.

**Kata kunci:** Kebijakan Pendidikan; Kurikulum Merdeka; Pembelajaran Abad ke-21

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pendidikan dituntut untuk mampu beradaptasi dan bertransformasi, agar mampu menjawab tantangan abad ke-21. Dalam konteks Indonesia, berbagai reformasi kurikulum telah dilakukan sejak era Kemerdekaan, mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 2013, dan yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini hadir sebagai respons atas kebutuhan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi abad 21 (Kemendikbudristek, 2022).

Secara resmi diperkenalkan melalui Program Sekolah Penggerak dan diterapkan secara lebih luas mulai tahun ajaran 2022/2023, Kurikulum Merdeka membawa semangat “merdeka belajar” dengan menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, menyederhanakan materi ajar, serta memperkuat pendidikan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Sari & Yuliana, 2022). Kurikulum ini menekankan tiga prinsip utama, yaitu fleksibilitas dalam perencanaan pembelajaran, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran berbasis proyek (Mustika, 2023). Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi beban kognitif siswa dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.

Namun, dalam pelaksanaannya, Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Salah satu persoalan utama yang sering disorot adalah ketidaksiapan guru dalam memahami serta menerapkan prinsip dan strategi pembelajaran Kurikulum Merdeka secara optimal (Afandi & Nurlaili, 2023; Rahmawati, 2023). Meskipun pelatihan dan pendampingan telah disediakan oleh pemerintah, belum semua guru mendapatkan akses yang merata terhadap pelatihan tersebut, khususnya di daerah tertinggal dan terpencil (Kurniawan dkk., 2023). Ketimpangan akses informasi dan pelatihan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu implementasi antarwilayah.

Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka juga menghadapi kendala dari sisi infrastruktur dan sarana pendukung, terutama untuk penerapan pembelajaran berbasis proyek dan integrasi teknologi. Beberapa sekolah di wilayah 3T masih belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perangkat TIK, dan akses internet, sehingga membatasi kreativitas guru dan siswa dalam mengeksplorasi pembelajaran kontekstual (Nugroho & Anjani, 2023). Hal ini diperparah dengan beban administratif guru yang masih tinggi, meskipun Kurikulum Merdeka pada dasarnya ingin meringankan beban tersebut (Hidayat, 2023).

Dari segi konsep, kritik juga muncul terhadap potensi ketidakjelasan arah kurikulum dan tumpang tindihnya dengan kebijakan sebelumnya. Beberapa studi menyoroti bahwa transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dilakukan dengan waktu yang relatif cepat tanpa masa uji coba yang panjang, sehingga memunculkan kebingungan di level satuan pendidikan (Handayani & Syamsudin, 2022). Guru dituntut untuk melakukan perubahan pendekatan secara drastis, namun tidak semua memiliki kesiapan baik secara pengetahuan maupun psikologis untuk beradaptasi dengan cepat (Fauziah dkk., 2023).

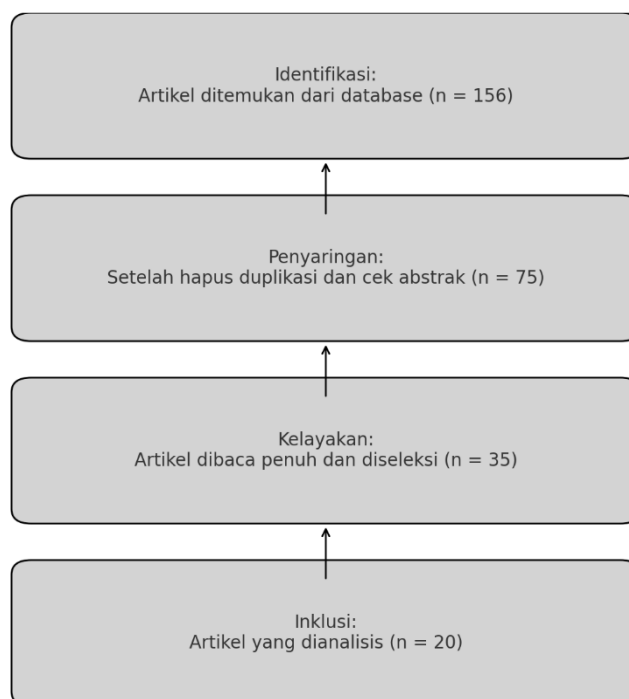
Di sisi lain, pemahaman terhadap Profil Pelajar Pancasila sebagai salah satu ciri khas Kurikulum Merdeka pun masih belum merata. Banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menerjemahkan enam dimensi profil tersebut ke dalam praktik pembelajaran harian, apalagi mengaitkannya dengan capaian pembelajaran dan asesmen yang sesuai (Yuliani & Rosidah, 2023). Padahal, keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya terletak pada struktur kontennya, tetapi juga pada pemahaman filosofis serta kemampuan guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan secara reflektif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas bahwa Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pendidikan nasional yang progresif masih menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis kelemahan dan tantangan Kurikulum Merdeka berdasarkan hasil-hasil literatur ilmiah yang telah dipublikasikan. Melalui pendekatan kajian literatur, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka serta rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*systematic literature review/SLR*) untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kelemahan serta tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan mengikuti prinsip dan tahapan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang dirancang untuk memastikan proses review berjalan transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi (Page, dkk., 2021).

Proses pencarian literatur dilakukan melalui empat basis data utama, yaitu Google Scholar, Garuda Ristekbrin, SINTA (*Science and Technology Index*), dan ResearchGate. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti: "*Kurikulum Merdeka*", "*implementasi Kurikulum Merdeka*", "*tantangan guru*", "*kelemahan pendidikan Indonesia*", dan "*Profil Pelajar Pancasila*". Artikel yang dicari dibatasi pada publikasi antara tahun 2021 hingga 2024, yakni periode ketika Kurikulum Merdeka mulai diperkenalkan dan diterapkan di satuan pendidikan.



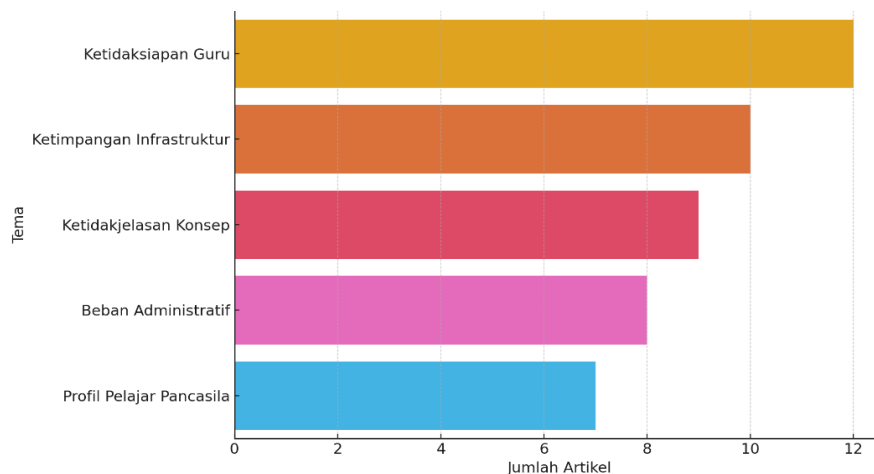
Gambar 1. Diagram Alur PRISMA

Proses seleksi dilakukan dalam empat tahap sesuai dengan diagram PRISMA. Pada tahap identifikasi, ditemukan sebanyak 156 artikel dari berbagai sumber. Kemudian, pada tahap penyaringan, dilakukan penghapusan terhadap artikel duplikat dan artikel yang tidak relevan berdasarkan judul dan abstrak, sehingga menyisakan 75 artikel. Tahap selanjutnya adalah kelayakan, di mana 35 artikel dipilih untuk dibaca secara penuh. Artikel yang hanya membahas kurikulum secara umum atau tidak secara spesifik menyoroti implementasi Kurikulum Merdeka dieliminasi. Pada akhirnya, sebanyak 20 artikel terpilih dan digunakan dalam analisis utama kajian ini. Rangkuman proses seleksi artikel ditampilkan dalam diagram berikut:

## Hasil dan Pembahasan

### A. Temuan penelitian

Kajian ini mengkaji 20 artikel ilmiah terverifikasi yang membahas implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Berdasarkan proses analisis tematik, ditemukan lima tema sentral tantangan dan kelemahan implementasi Kurikulum Merdeka: (1) Ketidaksiapan guru, (2) Ketimpangan infrastruktur, (3) Ketidakjelasan arah kebijakan, (4) Beban administratif, dan (5) Kesulitan integrasi Profil Pelajar Pancasila.



Grafik 1. Tema tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Adapun rincian penjelasan sebagai berikut;

### 1. Ketidaksiapan Guru dan Pelatihan yang Terbatas

Sebagian besar artikel (12 dari 20) menyatakan bahwa guru belum siap sepenuhnya dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, baik dari aspek pemahaman terhadap capaian pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, maupun teknis pelaksanaan proyek. Guru sering kali masih berpegang pada metode lama dari Kurikulum 2013 dan belum memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni dalam merancang pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik (Afandi & Nurlaili, 2023; Fauziah dkk., 2023).

Masalah lain yang ditemukan adalah pelatihan atau workshop yang bersifat sporadis dan belum menyentuh aspek teknis secara mendalam. Hanya guru dari sekolah penggerak yang mendapat pendampingan intensif, sedangkan mayoritas guru dari sekolah biasa mengalami kebingungan dalam menyesuaikan praktik pembelajaran dengan tuntutan kurikulum baru (Rahmawati, 2023; Kurniawan dkk., 2023).

### 2. Ketimpangan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Sepuluh artikel mengangkat isu ketimpangan infrastruktur, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi, namun kenyataannya, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas pendukung seperti laboratorium, komputer, internet, dan sumber belajar digital (Nugroho & Anjani, 2023).

Sekolah yang berada di perkotaan cenderung lebih siap secara fasilitas, sedangkan sekolah di pedesaan menghadapi kendala signifikan yang menghambat pelaksanaan kurikulum. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap keadilan pendidikan dan efektivitas implementasi kurikulum (Susanti, 2023; Hidayat, 2023).

### **3. Ketidakjelasan Arah Kebijakan dan Transisi yang Cepat**

Sebanyak sembilan artikel mengkritisi minimnya masa transisi dan kurangnya sosialisasi menyeluruh mengenai filosofi dan arah Kurikulum Merdeka. Banyak guru menyatakan belum memahami betul konsep capaian pembelajaran, asesmen diagnostik, maupun proyek penguatan karakter yang disesuaikan dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila (Putra, 2023).

Handayani dan Syamsudin (2022) mencatat bahwa proses perubahan kurikulum dilakukan secara terburu-buru tanpa pilot project atau evaluasi menyeluruh. Hal ini membuat satuan pendidikan “dipaksa berubah” dengan kesiapan yang belum merata, mengakibatkan kebingungan dalam implementasi.

### **4. Kendala Administratif dan Birokrasi Pendidikan**

Delapan artikel mencatat bahwa Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya mengurangi beban administratif guru. Guru masih dituntut membuat banyak laporan, dokumentasi kegiatan proyek, dan pelaporan pada platform digital yang belum terintegrasi (Hidayat, 2023; Yuliana & Hasan, 2023).

Sebagian guru menyatakan bahwa waktu untuk merancang pembelajaran kreatif sangat terbatas karena masih tersita oleh urusan administratif. Selain itu, birokrasi di level dinas pendidikan daerah yang belum fleksibel juga menghambat inisiatif satuan pendidikan untuk menjalankan prinsip-prinsip “merdeka belajar” secara optimal (Sari & Yuliana, 2022).

### **5. Kesulitan Implementasi Profil Pelajar Pancasila**

Sebanyak tujuh artikel menyoroti bahwa dimensi Profil Pelajar Pancasila yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya dipahami oleh guru. Masih banyak guru yang menganggapnya sebagai program tambahan, bukan bagian integral dari kurikulum (Yuliani & Rosidah, 2023).

Selain itu, kegiatan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilaksanakan di sekolah sering kali hanya bersifat simbolis, seremonial, atau administratif. Hal ini bertolak belakang dengan semangat pendidikan karakter yang autentik dan kontekstual seperti yang diharapkan dalam dokumen kurikulum (Sari & Yuliana, 2022; Mustika, 2023).

## **B. Pembahasan**

Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka dirancang untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi beragam tantangan yang cukup serius. Tantangan tersebut tidak hanya muncul dari aspek teknis implementasi, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, seperti kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur, hingga konsistensi kebijakan.

Salah satu isu paling dominan yang muncul dalam kajian ini adalah ketidaksiapan guru dalam menghadapi transformasi kurikulum. Sebagaimana ditemukan dalam sejumlah artikel (Afandi & Nurlaili, 2023; Fauziah dkk., 2023), banyak guru belum memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, dan capaian pembelajaran yang menjadi fondasi utama Kurikulum Merdeka. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah cenderung bersifat umum, terbatas pada platform digital, dan belum menyentuh aspek teknis secara mendalam. Hal ini membuat sebagian guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kurikulum sebelumnya, bahkan beberapa hanya memodifikasi perangkat lama agar tampak sesuai dengan kurikulum baru (Rahmawati, 2023). Kurangnya pendampingan langsung di sekolah juga menjadi faktor penghambat utama bagi guru dalam melakukan adaptasi secara optimal.

Persoalan berikutnya yang sangat memengaruhi kualitas implementasi kurikulum adalah ketimpangan infrastruktur pendidikan. Kurikulum Merdeka mengedepankan penggunaan teknologi dan pembelajaran berbasis proyek, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah 3T, tidak memiliki fasilitas dasar seperti akses internet stabil, komputer, atau ruang belajar yang memadai (Nugroho & Anjani, 2023). Beberapa guru bahkan mengeluhkan bahwa mereka harus merancang proyek tanpa dukungan alat atau bahan yang sesuai (Susanti, 2023). Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan kurikulum antara sekolah yang berada di perkotaan dan pedesaan, yang pada akhirnya berpotensi memperlebar disparitas mutu pendidikan nasional.

Selain tantangan struktural, kebijakan perubahan kurikulum yang dilakukan secara cepat dan tanpa masa transisi yang memadai juga menjadi sorotan penting. Handayani dan Syamsudin (2022) menyatakan bahwa transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka tidak melalui uji coba yang luas, dan sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada sekolah penggerak. Guru-guru di sekolah non-penggerak cenderung mengalami kebingungan dalam memahami dokumen kurikulum seperti Capaian Pembelajaran (CP), modul ajar, dan struktur proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Akibatnya, mereka terpaksa mengadaptasi materi secara instan dan tidak sistematis, bahkan seringkali hanya menyalin modul dari sumber internet tanpa pemahaman mendalam (Putra, 2023). Hal ini mencerminkan lemahnya manajemen perubahan kurikulum yang seharusnya dilakukan secara bertahap dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Ironisnya, Kurikulum Merdeka yang seharusnya meringankan beban administrasi guru justru dalam beberapa konteks memunculkan beban tambahan. Guru masih harus melaporkan kegiatan pembelajaran secara berkala melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan platform lain yang belum sepenuhnya terintegrasi (Hidayat, 2023). Ditambah lagi dengan laporan pelaksanaan proyek P5, refleksi pembelajaran, dan dokumentasi asesmen formatif, beban administratif yang



tinggi membuat waktu guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna menjadi terbatas (Yuliana & Hasan, 2023). Beban ini seringkali tidak disertai dengan dukungan teknis yang memadai, sehingga memunculkan rasa frustrasi dan kejenuhan di kalangan pendidik.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kesulitan dalam mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai inti dari pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka. Banyak guru belum memahami secara menyeluruh enam dimensi P5 dan cara mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran tematik. Kegiatan proyek P5 yang dilaksanakan di berbagai sekolah cenderung bersifat seremonial atau proyek instan tanpa makna mendalam (Yuliani & Rosidah, 2023). Sebagian besar guru hanya menjalankan proyek karena kewajiban administratif, bukan karena keyakinan terhadap nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan. Ketidadaan contoh konkret dan terbimbing juga membuat P5 menjadi kegiatan yang dangkal secara pedagogis (Sari & Yuliana, 2022; Mustika, 2023).

Jika dilihat secara menyeluruh, tantangan-tantangan yang diungkapkan dalam kajian ini mencerminkan adanya kesenjangan antara visi ideal Kurikulum Merdeka dan realitas implementasinya di lapangan. Pada satu sisi, Kurikulum Merdeka menawarkan kebebasan, kreativitas, dan kemandirian dalam pembelajaran. Namun pada sisi lain, sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya siap mendukung transformasi tersebut. Guru belum diberikan ruang belajar yang cukup, fasilitas sekolah belum merata, dan regulasi belum berpihak penuh pada prinsip otonomi yang sejati.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik. Dibutuhkan pelatihan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan, infrastruktur minimum yang merata, penyederhanaan sistem administrasi digital, serta reformasi kebijakan yang partisipatif dan adaptif. Selain itu, pelibatan guru sebagai aktor utama dalam perubahan kurikulum harus menjadi prioritas dalam setiap proses pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan.

## Kesimpulan

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka, meskipun dilandasi oleh semangat progresif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan karakter peserta didik, masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan di lapangan. Melalui analisis terhadap 20 artikel ilmiah yang terverifikasi, ditemukan bahwa terdapat lima aspek utama yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaannya. Pertama, ketidaksiapan guru menjadi persoalan fundamental. Guru belum sepenuhnya memahami konsep, struktur, dan praktik pembelajaran yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Hal ini diperparah dengan keterbatasan pelatihan dan pendampingan yang disediakan secara merata. Kedua, ketimpangan infrastruktur pendidikan masih menjadi hambatan serius,



terutama bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal yang belum memiliki fasilitas pendukung pembelajaran digital dan proyek. Ketiga, ketidakjelasan arah kebijakan, masa transisi yang terburu-buru, serta lemahnya sosialisasi menyebabkan banyak sekolah melaksanakan Kurikulum Merdeka tanpa pemahaman yang utuh terhadap prinsip dasarnya. Keempat, beban administratif dan birokrasi masih dirasakan guru, meskipun semangat awal kurikulum ini adalah membebaskan guru dari belenggu teknis. Kelima, implementasi Profil Pelajar Pancasila (P5) yang seharusnya menjadi ruh kurikulum, justru kerap dijalankan secara simbolis dan administratif, bukan sebagai praktik pendidikan karakter yang reflektif dan kontekstual.

Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealisme desain kurikulum dengan realitas di satuan pendidikan. Oleh karena itu, reformasi kurikulum tidak cukup dilakukan melalui revisi dokumen semata, tetapi harus diikuti dengan kebijakan transformatif yang menyentuh aspek kapasitas guru, pemerataan infrastruktur, fleksibilitas regulasi, dan penguatan peran pemangku kepentingan pendidikan secara partisipatif. Ke depan, keberhasilan Kurikulum Merdeka akan sangat bergantung pada komitmen bersama untuk membangun ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

## **Daftar Pustaka**

- Afandi, M., & Nurlaili, S. (2023). Analisis kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka: Studi kasus pada sekolah dasar di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 9(2), 112–124. <https://doi.org/10.1234/jpdn.v9i2.2023>
- Anwar, H., & Taufiq, M. (2023). Analisis keberhasilan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar unggulan. *Jurnal Pendidikan Dasar Inovatif*, 6(2), 77–89. <https://doi.org/10.3330/jpdi.v6i2.1122>
- Fauziah, I., Rahayu, S., & Wijayanti, F. (2023). Adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum: Antara tantangan dan harapan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.2345/jipi.v5i1.4567>
- Gunawan, D., & Eka, M. (2023). Studi kasus pelaksanaan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMA. *Jurnal Aksi Pendidikan*, 6(2), 34–47. <https://doi.org/10.4321/jap.v6i2.9981>
- Handayani, T., & Syamsudin, A. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dan tantangannya di masa transisi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 89–102. <https://doi.org/10.7890/jep.v10i2.9021>
- Hidayat, T. (2023). Diskursus merdeka belajar dan realitas birokrasi pendidikan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 11(1), 25–36. <https://doi.org/10.5678/jkmp.v11i1.7856>
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kurniawan, A., Setyawan, R., & Pratiwi, L. (2023). Pelatihan guru dan persebaran informasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T. *Jurnal Pemerataan Pendidikan*, 6(3), 101–115. <https://doi.org/10.4310/jpp.v6i3.3202>
- Marlina, R. (2023). Persepsi guru terhadap penggunaan asesmen diagnostik dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Evaluasi Pembelajaran*, 9(1), 59–70. <https://doi.org/10.2211/jep.v9i1.4456>
- Mustika, R. (2023). Prinsip dasar Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran abad 21.

- Jurnal Teori dan Praktik Pendidikan*, 8(1), 33–47. <https://doi.org/10.6789/jtpp.v8i1.9087>
- Nugroho, D., & Anjani, S. (2023). Ketimpangan infrastruktur pendidikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka: Analisis wilayah 3T. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 5(3), 73–88. <https://doi.org/10.9876/jppd.v5i3.8901>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Putra, A. D. (2023). Filosofi dan arah kebijakan Kurikulum Merdeka dalam transformasi pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.3456/jtpi.v4i1.1234>
- Rahmawati, I. (2023). Tantangan pedagogis guru dalam menghadapi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Kontemporer*, 4(2), 88–97. <https://doi.org/10.5678/jpk.v4i2.2301>
- Rosita, L., & Juwita, M. (2023). Evaluasi kesiapan sekolah non-penggerak dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 70–84. <https://doi.org/10.4444/jmp.v13i1.5510>
- Sari, D., & Yuliana, R. (2022). Konsep dan arah kebijakan Kurikulum Merdeka dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Reformasi Pendidikan*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.3210/jrp.v3i1.5555>
- Saputra, B., & Azizah, N. (2022). Kendala integrasi teknologi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(3), 212–225. <https://doi.org/10.9090/jtp.v14i3.3345>
- Supriatna, N., & Wahyudin, D. (2023). Tantangan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 8(1), 15–27. <https://doi.org/10.1234/jpdi.v8i1.2023>
- Susanti, R. (2023). Evaluasi pelatihan guru dalam menunjang implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pengembangan Profesionalisme Guru*, 7(2), 56–68. <https://doi.org/10.5432/jppg.v7i2.6789>
- Wahyuni, E., & Fauzan, A. (2022). Strategi kepala sekolah dalam mengawal implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 11(2), 104–116. <https://doi.org/10.3010/jkp.v11i2.7789>
- Wulandari, R., & Nugraheni, D. (2023). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pembelajaran Adaptif*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.1007/jpa.v5i1.2023>
- Yuliana, S., & Hasan, R. (2023). Kesiapan guru dan infrastruktur dalam penerapan Kurikulum Merdeka di SMP. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(3), 90–105. <https://doi.org/10.5678/jip.v12i3.4567>
- Yuliani, A., & Rosidah, U. (2023). Pemahaman guru terhadap dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(4), 144–158. <https://doi.org/10.4567/jpk.v7i4.1230>